

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara maritim dan agraris sebagian besar menjadi nelayan dengan kekayaan laut yang melimpah dan menjadi penghasil ikan terbesar di dunia, namun tidak hanya itu mayoritas penduduk di Indonesia bekerja menekuni di sektor pertanian. Tidak hanya itu Indonesia salah satu yang dilalui garis lintang zona khatulistiwa serta memiliki beragam jenis hutan seperti hutan hujan tropis, ditambah dengan kesuburan tanahnya, telah mendorong pemanfaatan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini, Pertanian Indonesia sedang dihadapkan oleh berbagai permasalahan, salah satunya terkait lahan pertanian. Penurunan lahan pertanian khususnya lahan sawah terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dewantoro (2022) berpandangan bahwa pentingnya sektor pertanian bagi bangsa, wajar jika pembangunan pertanian baik kualitas maupun kuantitas produksi atau menyediakan pasar - pasar bagi hasil-hasil pertanian baik kualitas maupun meningkat taraf kesejahteraan petani.

Terdapat dua jenis lahan dalam sektor pertanian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan bercocok tanam sebagai sumber penghasilan utama mereka sebagai petani. Secara umum, pertanian di Indonesia di bagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah (pertanian sawah) dikembangkan melalui sistem

monokultur dan tumpang sari. Dalam sistem monokultur, lahan persawahan digunakan secara eksklusif untuk satu jenis tanaman, yakni padi. Sementara itu, sistem tumpang sari memanfaatkan lahan untuk tanaman lain selain padi, seperti palawija dan sayuran. Pertanian lahan kering merupakan jenis budidaya yang mengandalkan sumber daya air yang relatif terbatas, dengan sistem yang mencakup telaga, hortikultura, dan perkebunan. Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian yaitu suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.

Kabupaten Bandung sebagai wilayah agraris di mana mayoritas penduduknya mengonsumsi beras yang dihasilkan dari tanaman padi, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional seiring dengan pertumbuhan populasi, Padi memainkan peran krusial sebagai sumber karbohidrat utama, selain jagung, sagu, dan umbi-umbian yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Namun, luas area panen, produktivitas, dan produksi padi di Indonesia tidak stabil, yang disebabkan oleh menurunnya luas area serta penurunan lahan pertanian, sehingga menghambat pencapaian hasil produksi optimal. Sumber daya alam merupakan elemen penting bagi manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Berbagai cara pemanfaatan sumber daya ini dapat dilakukan, seperti memanfaatkan lahan kosong atau galengan pematang sawah untuk ditanami sayuran dan komoditas lainnya. Di era pembangunan saat ini, pemanfaatan lahan produktif sering kali berubah jadi alih fungsi lahan

bangunan pemukiman, yang pada akhirnya menyebabkan kepadatan penduduk yang signifikan sehingga lahan produktif mengalami penurunan dalam capaian hasil panen yang stabil dalam menjaga ketahanan pangan lokal maupun nasional.

Desa Bojongsoang di Kabupaten Bandung memiliki potensi substansial di sektor pertanian dan perikanan, yang berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Namun, konversi lahan menjadi ancaman utama bagi kelestarian sektor ini. Faktor pendorong utamanya adalah nilai ekonomi langsung yang rendah dari lahan pertanian setempat, yang mendorong alih fungsi lahan dan menggerus fondasi ketahanan pangan masyarakat. Lebih lanjut, ketahanan pangan menjadi isu krusial dalam pembangunan negara berkembang, karena berperan ganda sebagai prioritas pembangunan sekaligus instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Desa Bojongsoang merupakan salah satu dari enam desa di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dengan luas wilayah mencapai 395,50 hektar, Desa Bojongsoang berbatasan dengan Desa Lengkong di utara, Desa Bojongsari/Kecamatan Baleendah di selatan, Desa Buahbatu/Desa Bojongsari di timur, serta Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot di barat. Desa ini juga dilintasi oleh jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, sehingga mendukung aksesibilitas transportasi. Secara geografis, desa ini terletak pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, dengan jenis tanah latosol yang memiliki tingkat keasaman (pH) sekitar 4,5–6. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 22 mm, disertai suhu udara stabil sekitar 28°C.

Kondisi fisik lingkungan ini menjadikan wilayah Desa Bojongsoang sangat potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan serta budidaya ikan nila. Potensi unggulan desa berada di Dusun II yaitu Kampung Cikoneng mencakup keberadaan dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan anak Sungai Citarum, yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pengelolaan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian dan budidaya ikan di Desa Bojongsoang telah terjadi sejak tahun 2009 dan bukan fenomena baru. Peningkatan taraf hidup masyarakat membuka peluang usaha baru, yang mendorong aktivitas pembangunan oleh investor, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga meningkatkan permintaan lahan secara signifikan. Di Dusun II Cikoneng Bojongsoang, lahan pertanian yang sebelumnya didominasi oleh penanaman padi dan budidaya ikan kini semakin berkurang akibat beralih fungsi menjadi kawasan perumahan yang kian melebar tiap tahunnya. Fenomena ini terjadi di Desa Bojongsoang, khususnya di Dusun II Kampung Cikoneng, di mana kawasan persawahan beralih fungsi menjadi (zona kuning) industri dan perumahan, yang menjadi faktor utama penurunan aktivitas pertanian dan pembudidayaan ikan. Keterbatasan lahan yang tersedia juga menyebabkan pola pemanfaatan lahan menjadi tidak stabil, sehingga menghambat optimalisasi sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan lokal.

Menurut (Kamilah, 2013) nilai ekonomi lahan pertanian, khususnya sawah, jauh lebih rendah dibandingkan lahan untuk properti, perumahan, atau industri. Pendapat serupa dikemukakan oleh (Rustjadi, 2011), yang menyatakan bahwa

nilai lahan pertanian cenderung rendah karena manfaat ekonomi langsung yang diperoleh relatif kecil, sehingga mendorong konversi lahan secara masif. Perubahan jenis lahan merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan diikuti pengurangan di sektor lainnya, atau dengan kata lain, perubahan penggunaan lahan adalah perubahan fungsi lahan dalam periode waktu tertentu, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Menurut (Budihari, 2007: 19), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal: pertama, keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dan kedua, berkaitan dengan peningkatan tuntutan terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

Kelangkaan sumber daya lahan terkait erat dengan pertumbuhan penduduk dan persaingan permintaan terhadap lahan. Terdapat kecenderungan dari masyarakat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa sebagian kelebihan daya beli pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi disalurkan dalam bentuk investasi pada lahan atau tanah. Alih fungsi lahan produktif, dalam arti perubahan penggunaan lahan menjadi non produktif pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan. Penurunan lahan pertanian di wilayah Cikoneng Bojongsoang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat hal ini akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pasokan

pangan. Tentunya wilayah ini menjadi pemasok kebutuhan ketahanan pangan tingkat lokal maupun nasional dengan hasil panen padi dan ikan yang melimpah setiap tahunnya, Pada tahun 2012 - 2013 Desa Bojongsoang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi produksi padi paling signifikan di Kecamatan Bojongsoang. Kondisi ini ditunjukkan dengan luas area panen sebesar 759,67 hektare dengan total hasil produksi mencapai (4.633,96 kuintal) 463 ton (BPS Kabupaten Bandung, 2012). Capaian tersebut menggambarkan besarnya potensi sektor pertanian di wilayah ini, sekaligus menempatkan peran strategis Desa Bojongsoang dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional pada masa itu. namun seiring waktu, wilayah ini berpotensi menjadi kota sepenuhnya di masa depan, sehingga diperlukan komitmen dari pembuat kebijakan untuk mengelola dan merencanakan tata ruang publik agar menjadi kota ideal sesuai konsep kota berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena hampir di semua wilayah. Salah satu aspek yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkannya. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tidak bisa tergantikan. Penurunan produksi akibat alih fungsi lahan bersifat permanen dan sulit diperbaiki, sehingga berkurangnya luas lahan untuk kegiatan pertanian secara drastis dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta tidak stabilnya harga komoditas pasar, petani dituntut untuk beradaptasi terhadap berbagai dinamika yang mempengaruhi hasil panen. Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sektor ini tidak hanya menyediakan bahan pangan pokok, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekspor komoditas (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Dalam kondisi tersebut, tidak hanya aspek teknis pertanian yang menentukan keberhasilan, tetapi juga aspek komunikasi yang berperan dalam proses pertukaran informasi, pengambilan keputusan, serta penguatan solidaritas antar petani. Sektor pertanian tidak hanya memastikan ketersediaan pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan. Tantangan seperti ketidakstabilan harga komoditas memerlukan strategi komunikasi untuk membangun jaringan petani yang kuat dan adaptif (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2023).

Penghasilan warga di Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang, sebagian besar berasal dari kegiatan utama sebagai petani padi dan pembudidaya ikan (mujair, mas, lele). Dengan lahan produktif seluas 2.781,22 hektar (27,81 km²), sekitar 70% atau 2.061 hektar lahan di Kecamatan Bojongsoang adalah lahan

pertanian (UPTD Pertanian Kecamatan Bojongsoang, 2022). Luas lahan pertanian sawah, baik irigasi maupun tadah hujan, di Desa Bojongsoang mencapai 1.597 hektar, dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 464 hektar. Luas lahan pertanian tersebut mengalami penyusutan dibandingkan tahun 2014, ketika lahan pertanian sawah seluas 1.602 hektar dan lahan pertanian bukan sawah seluas 580 hektar, sehingga terjadi penyusutan lahan pertanian sebanyak 121 hektar. Sementara itu, lahan nonpertanian seperti pemukiman, perkantoran, jalan, dan infrastruktur lainnya menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2014–2022. Pada tahun 2014, luas lahan nonpertanian adalah 599 hektar, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 720 hektar (BPS Kabupaten Bandung, 2023).

Peran pemerintah daerah menjadi salah satu aktor penting dalam peralihan lahan produktif dari zona hijau (sawah, kebun, resapan air) menjadi zona kuning (perumahan, dll.) yang mana mengundang investor/developer tertarik membeli lahan pertanian untuk dijadikan lahan nonpertanian, dan pemerintah daerah tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Fenomena dalam beberapa tahun ke belakang menunjukkan munculnya sengketa tanah yang luar biasa. Sengketa tersebut terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar masalah ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar.

Dalam konteks pembangunan pertanian, Teori Komunikasi Partisipatif relevan untuk menjelaskan bagaimana organisasi tersebut aktif dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan tindakan. Dalam organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI), komunikasi partisipatif memungkinkan pemuda tani Indonesia tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor utama sekaligus membantu masyarakat Cikoneng.

Bordenave dan Carvalho (1994) berpandangan bahwa dalam komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi unsur utama karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi, tetapi oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Freire (1970) menegaskan bahwa komunikasi yang membebaskan harus bersifat dialogis, di mana setiap individu memiliki kesempatan sama untuk berbicara, mendengar, dan merefleksikan realitas sosial secara kritis.

Teori komunikasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan (Bordenave, 1994). Hal ini sejalan dengan pandangan Freire (1970) yang menyatakan bahwa komunikasi efektif harus bersifat dialogis dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Dalam konteks organisasi petani, pendekatan partisipatif memungkinkan petani berperan sebagai subjek yang menentukan strategi pengelolaan hasil panen sesuai kebutuhan mereka. Melalui interaksi tersebut, petani membangun pemahaman bersama mengenai keberhasilan maupun

kegagalan panen, serta menentukan sikap dan tindakan kolektif dalam merespons masalah pertanian. Dengan demikian, teori interaksi simbolik membantu memahami bagaimana realitas pertanian dimaknai secara subjektif oleh petani dan bagaimana makna tersebut memengaruhi pola komunikasi, solidaritas, serta pengambilan keputusan dalam organisasi petani.

Dalam konteks pemuda, peran generasi muda dalam sektor pertanian semakin mendapat perhatian. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerus petani, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa inovasi, semangat kolektif, serta pemanfaatan teknologi dan jejaring sosial. Salah satu wadah yang mengorganisir dan menggerakkan pemuda di sektor pertanian adalah Pemuda Tani Indonesia (PTI).

Pemuda Tani Indonesia (PTI) hadir sebagai organisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda tani melalui komunikasi, pendampingan, dan penguatan solidaritas menghadapi tantangan pertanian. Pada skala lokal, organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) di wilayah Kampung Cikoneng, Bojongsoang, berfungsi sebagai wadah komunikasi bagi para pemuda tani untuk menanggapi hasil panen yang diperoleh. Ketidakstabilan hasil panen tersebut memerlukan proses komunikasi yang intensif, yang dapat berupa diskusi, musyawarah, pertukaran pengalaman, atau koordinasi aksi kolektif. Pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) dalam menghadapi hasil panen baik pada saat keberhasilan maupun penurunan merupakan elemen krusial yang membentuk sikap, keputusan, dan perilaku masyarakat di wilayah Cikoneng, Bojongsoang.

Meskipun demikian, kondisi fakta di lapangan mengungkapkan bahwa tanggapan terhadap hasil panen tidak selalu konsistens di antara para anggota organisasi. Variasi dalam latar belakang, pengalaman pertanian, serta akses terhadap informasi dapat mempengaruhi interpretasi anggota Pemuda Tani Indonesia (PTI) terhadap hasil panen dan penentuan langkah langkah berikutnya. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mekanisme komunikasi yang berlangsung dalam organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI), aktor-aktor yang terlibat, serta mengkonstruksi makna kolektif dalam memproduksi hasil panen di wilayah Kampung Cikoneng, Bojongsoang.

Aktivitas pertanian di wilayah Kampung Cikoneng, Bojongsoang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi tengkulak. Tengkulak berperan sebagai entitas yang mengakuisisi produk panen dari petani, budidaya ikan. Keterlibatan tengkulak tidak terbatas pada fungsi sebagai pembeli semata, melainkan juga mencakup peran krusial sebagai pemasok modal bagi petani. Ragam peran tersebut menimbulkan ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Ketergantungan ini muncul akibat adanya hubungan sosial yang bersifat solidaritas dan simbiosis mutualistik, sehingga petani kesulitan untuk memutuskan ikatan tersebut. Selain itu, tengkulak memainkan peran signifikan dalam membangun jaringan dengan berbagai aktor, mulai dari petani hingga pedagang. Ketergantungan ini juga ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasi yang dimiliki petani, yang pada gilirannya menghambat upaya mereka untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Sistem perdagangan

hasil panen di kalangan petani desa sering kali bergantung pada peran tengkulak.

Tengkulak berfungsi sebagai pengepul yang membeli produk pertanian dari petani dan kemudian mendistribusikannya ke agen-agen besar. Berdasarkan penelitian Hardinawati (2017), tengkulak merupakan pihak utama yang bersedia membeli hasil panen petani. Alice Dewey (1962) dalam kajiannya tentang pola perdagangan menjelaskan bahwa tengkulak merupakan elemen penting dalam jaringan pasar. Menurut Dewey, tengkulak membeli berbagai produk, termasuk hasil pertanian, barang industri rumah tangga, produk manufaktur dari pedagang keliling, perwakilan pabrik, hingga agen importir. Sementara itu, Suwardihagani (2008) menyatakan bahwa tengkulak telah lama menjadi aktor utama dalam pasar perdagangan tradisional di Indonesia. Suwardihagani menekankan bahwa tengkulak berperan sebagai pengumpul (gatherer), pembeli (buyer), pialang (broker), pedagang (trader), pemasar (marketer), dan bahkan kreditor.

Isnawati (2017) dalam penelitiannya mengenai Inklusi Sayuran Farm Veggie Way di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa transaksi jual beli sayuran melibatkan dua jenis rantai distribusi. Pertama, dari petani ke pedagang tengkulak, kemudian ke pedagang pengepul, selanjutnya ke pedagang pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Kedua, dari petani langsung ke pedagang tengkulak, lalu ke pedagang pengecer, dan sampai ke konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut mencapai konsumen setelah melalui beberapa tahap distribusi.

Penelitian Hardinawati (2017) juga mengungkap beberapa alasan petani menjual hasil panen kepada tengkulak. Petani dengan mudah menyerahkan panen kepada tengkulak karena tengkulak mampu menangani proses pemanenan hingga pengangkutan secara mandiri. Tengkulak juga memiliki tenaga kerja untuk kegiatan pemanenan. Biasanya, petani tidak perlu melakukan pemanenan, penggilingan hasil panen seperti padi, dan ikan. Tengkulak akan memanen dan segera mengangkut hasil panen. Selain itu, tengkulak mampu membeli hasil panen dalam volume besar, yang terkait dengan jaringan mereka dengan agen-agen besar, namun biasanya tengkulak membeli dengan harga yang kurang sebanding dengan apa yang petani harapkan.

Hardiyanto (2015) dalam studinya menjelaskan bahwa tengkulak juga berperan sebagai penyedia modal bagi petani, menyebabkan ketergantungan petani untuk meminjam modal yang tinggi terhadap tengkulak, tengkulak memanfaatkan posisi sebagai pemberi modal untuk mengikat petani agar terus menjual hasil panen kepadanya. Situasi ini dimanfaatkan tengkulak baik pada masa panen melimpah maupun gagal panen, Tengkulak sangat memanfaatkan periode gagal panen, ketika harga hasil panen turun drastis dan petani kehabisan modal untuk penanaman selanjutnya. Isnawati (2017) menjelaskan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa absennya hubungan formal antara petani dan tengkulak membuat petani tidak mengetahui harga pasar, sehingga petani hanya dapat menerima kondisi yang ditentukan tengkulak.

Proses pembelian hasil panen oleh tengkulak kepada petani umumnya dilakukan dengan harga yang sangat rendah. Isnawati (2017) menunjukkan

bahwa tengkulak merupakan pelanggan utama bagi petani, sehingga petani cenderung mempercayakan penjualan hasil panennya kepada tengkulak kapan saja masa panen tiba. Tengkulak memiliki kemampuan untuk menentukan harga pembelian dengan mudah. Bahkan, pembelian sering kali menggunakan sistem tebas, yaitu berdasarkan luas lahan pertanian, bukan pada jumlah atau berat hasil panen. Hal ini sering menimbulkan masalah karena luas lahan tidak selalu mencerminkan kuantitas dan kualitas panen.

Meskipun demikian, petani tetap bersedia menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak karena posisi tawar mereka yang lemah. Isnawati juga mengungkapkan bahwa tengkulak sering kali menunda atau terlambat dalam membayar petani. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), setiap bentuk kerja sama dalam sebuah model bisnis mengandung unsur risiko yang harus dikelola secara strategis. Dalam konteks pertanian, pola kerja sama antara petani dengan tengkulak sering kali menimbulkan berbagai persoalan struktural.

Hubungan ini umumnya tidak memberikan keuntungan optimal bagi petani karena skala ekonomi yang terbatas dan posisi tawar yang lemah. Selain itu, sistem pemasaran melalui tengkulak mengandung tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi, terutama terkait kestabilan harga dan ketergantungan modal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya dorongan bagi petani untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka sebagai produsen yang mandiri. Akibatnya, petani cenderung terjebak dalam pola produksi tradisional yang sulit berkembang secara berkelanjutan.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena rendahnya daya tawar kepada petani dalam produksi hasil panen, tidak stabilnya hasil panen, keterbatasan akses informasi kepada petani lokal, serta dominasi pihak luar dalam distribusi hasil panen, maka komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pembuka ruang dialog, kesadaran kritis, partisipasi, refleksi-aksi (*praxis*), dan pembebasan, serta negosiasi antar petani kepada tengkulak. Oleh karena itu penulis membuat sebuah pertanyaan penelitian melalui indikator teori komunikasi partisipatif :

1. Bagaimana keberadaan Pemuda Tani Indonesia (PTI) di Kampung Cikoneng Bojongsoang dalam membantu petani lokal?
2. Bagaimana bentuk partisipasi petani lokal dalam proses dialog, pengambilan keputusan, dan tindakan kolektif dengan Pemuda Tani Indonesia (PTI) DPC, Kab. Bandung?
3. Bagaimana komunikasi partisipatif organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) untuk membentuk kesadaran kritis dan strategi bersama dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi dan budaya di wilayah itu?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menganalisis peran dan cara proses komunikasi organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) di Kampung Cikoneng, Bojongsoang, untuk hadir di masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perkembangan diatas, maka penulis merangkum beberapa tujuan dalam penelitian ini. Antara lain:

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemuda Tani Indonesia (PTI) dalam melakukan komunikasi kepada petani lokal dalam pembangunan pertanian agar berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan petani serta menjadi penyalur aspirasi kepada pemerintah daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya dalam bidang Ilmu Komunikasi, terutama dalam studi komunikasi partisipatif di bidang pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi akademik yang menjelaskan peran komunikasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah hasil panen:

1. Bagi Pemuda Tani Indonesia (PTI): Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Eksistensi organisasi yang lebih partisipatif di wilayah Cikoneng Bojongsoang.
2. Bagi Petani: Penelitian ini berperan sebagai sumber pembelajaran untuk mengembangkan komunikasi yang lebih terbuka, setara, dan kolaboratif saat menghadapi tantangan hasil panen maupun subsidi dari pemerintah.

3. Bagi Pemerintah Desa/Dinas Terkait: Penelitian ini memberikan masukan untuk merancang program pemberdayaan petani yang didasarkan pada komunikasi partisipatif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan referensi awal untuk penelitian serupa yang berkaitan dengan komunikasi partisipatif, pemberdayaan, dan pembangunan sektor pertanian.

